



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

SKRIPSI

Oleh:
M. Taufiq
NIM 100810101106

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
M. Taufiq
NIM 100810101106

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Dariyah dan Ayahanda Ali Hasan dan Akhmad Sidik, yang memberi dukungan, doa dan pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh
(PMII)

Keajaiban datang karena diciptakan melalui pertarungan, bukan lamunan
(Dien Albanna)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufiq

NIM : 100810101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Besuki” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

M. Taufiq

100810101106

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI

Oleh:

M. Taufiq

100810101106

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Rafael PS., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Sebastiana V., M.Kes.

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian
Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah Eks.
Karesidenan Besuki

Nama Mahasiswa : M. Taufiq

NIM : 100810101106

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Rafael PS., M.Si.
NIP. 19581024 198803 1 001

Dr. Sebastiana Viphindartin., M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin., M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP PDRB SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH
EKS KARESIDENAN BESUKI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Taufiq
NIM : 100810101106
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

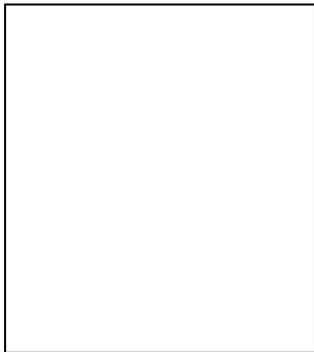
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

01 April 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim, M.Si. (.....)
NIP. 196507301991032001
2. Sekretaris : Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, M.Sc. (.....)
NIP. 195608311984031002
3. Anggota : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si. (.....)
NIP. 197106102001122002



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si
NIP. 19630614199002 1 001

*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor
Pertanian di Wilayah Eks. Karesidenan Besuki*

M. Taufiq

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian yang dapat mempengaruhi PDRB sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), yang terdiri dari data *times series* selama periode 2005-2014 dan data *cross section* 4 kabupaten di Eks Karesidenan Besuki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. koefisien regresi positif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, meningkat dapat menyebabkan peningkatan PDRB sektor pertanian.

Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja

*Influence of Government Expenditure in the Agricultural Sector Against the PDRB
Agriculture Sector in the Region Eks Karesidenan Besuki*

M. Taufiq

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

The agricultural sector is one of the leading sectors in the region Eks Karesidenan Besuki. This study aimed to analyze the effect of government spending in the agricultural sector and employment in the agricultural sector that could affect the agricultural sector GDP . This study uses secondary data analysis tools to approach the data panel Fixed Effect Model (FEM) , which consists of the data times series during the period from 2005 to 2014 and cross section 4 districts in Eks Karesidenan Besuki. The results of this study indicate that the agricultural sector of government spending significant positive effect on the agricultural sector GDP, employment significant positive effect on the agricultural sector GDP, positive regression coefficient indicates that government spending , labor , increases may cause an increase in the agricultural sector GDP .

Keywords : *Gross Regional Domestic Product , government spending , and Labor*

RINGKASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah Eks Karesidenan Besuki; M. Taufiq, 100810101106; 2016: 87 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam rangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Wilayah Eks. Karasidenan Besuki merupakan suatu wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur bagian timur. Wilayah ini terdiri dari empat Kabupaten diantaranya : Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, dan Kab. Situbondo. Empat kabupaten ini masuk dalam wilayah cluster Agropolitan Ijen. Wilayah Eks. Realisasi pembangunan ekonomi dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, sebagai gambaran dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada wilayah Eks. Karasidenan Besuki angka pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten, hanya dua kabupaten yang memiliki angka

pertumbuhan yang tergolong baik sedangkan dua kabupaten yang lain memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Laju pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah di pengaruhi dari bagian bagian daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yaitu melalui peningkatan pengeluaran sektor pertanian. Laju pertumbuhan pertanian di tiap daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dalam daerah itu sendiri. Perbedaan kapasitas daerah mempengaruhi besaran PDRB, di mana PDRB merupakan tingkat output yang dapat mengidentifikasi pertumbuhan sektor tersebut. Salah satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian yaitu dengan pendanaan sektor pertanian yaitu pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah dapat mengendalikan melalui instrument kebijakan yang dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya untuk pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh institusi dan kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki TUPOKSI untuk pembangunan sektor pertanian khususnya di Eks. Karasidenan Besuki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di wilayah Eks Karesidenan Besuki dan bagaimana peran pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja pada PDRB di Eks Karesidenan Besuki. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel tahun 2005-2014 pada 4 kabupaten di Eks Karesidenan Besuki. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Eks Karesidenan Besuki.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Besuki”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rafael Purtomo S, M.Si. dan Ibu Sebastiana Viphindartin, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Seluruh Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
4. Orang tua terbaik, Ibunda Dariyah dan Ayahanda Ali Hasan yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;
5. Keluarga besar di Pasuruan terimakasih atas doa, bantuan, dukungan, serta motivasi yang selalu diberikan;
6. Tunanganku “Ana Qurrotul Aini”. Terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga dapat terselesaikanya penulisan skripsi ini;
7. Sahabat/I seperjuangan, Hois, Tamam, Rembo, Yeni, Dufi, Yohanna, Mutia, Rosyid, Roni, Diah, Ula, Dio, Hudi, Wahyu, Vina, Rizal, dan Jajaran Kepengurusan Periode 2012-2013 yang telah memberikan segala bantuan,

ilmu, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis;

8. Seluruh keluarga besar PMII Rayon Fakultas Ekonomi, terimakasih atas kekeluargaan, kebersamaan, canda tawa dan pengalaman selama berproses di Rumah Biru “Salam Pergerakan”;
9. Keluarga besar Rumah Aspirasi H.M. Nur Purnamasidi, Mas Lucik, Mas Sugik, Mas Sutris, Mas Kiyak, Mas Makmur, dll. terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan bagi penulis;
10. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Anda berikan. Penulis juga menerima saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat pada kita semua.

Jember, 09 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith.....	10
2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod Domar	12
2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Scumpether.....	14
2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Neoklasik.....	15
2.1.2 Teori Produk Domestik Regional Bruto	16

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.4 Kebijakan Fiskal dan APBD	22
2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah	25
2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	25
2.1.5.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Adolf Wagner	26
2.1.5.3 Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock Wiseman.....	26
2.1.6 Pengelompokan Pengeluaran Pemerintah	28
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian	30
2.1.8 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	32
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Konseptual.....	38
2.4 Hipotesis Penelitian	39
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Rancangan Penelitian.....	40
3.1.1 Jenis Penelitian.....	40
3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.2 Metode Analisis Data.....	41
3.2.1 Analisis Regresi Data Panel	41
3.2.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	42
3.2.3 Uji Statistik.....	45
3.2.4 Uji Asumsi Klasik	47
3.3 Definisi Variabel Operasional	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Umum.....	51
4.1.1 Kabupaten Jember	51
4.1.2 Kabupaten Bondowoso	53
4.1.3 Kabupaten Situbondo	56
4.1.4 Kabupaten banyuwangi	58

4.2 Hasil Penelitian	61
4.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Besuki	61
4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	62
4.2.3 Hasil Uji Statistik	64
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian	69
4.3.2 Pengaruh Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian	70
4.3.3 Koefisien wilayah di Eks Karesidenan Besuki	71
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Tiga Wilayah Penyumbang PDRB Tertinggi Tahun 2010-2012.....	3
Tabel 1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	4
Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks Karasidenan Besuki Tahun 2006-2012	5
Tabel 1.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013	6
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Uji Statistik Durbin-Watson	49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2010-2014.....	52
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember.....	52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2009-2013	54
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso	55
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2009-2013.....	56
Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo.....	57
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2009-2013	59
Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2013.....	59
Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> Variabel Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB.....	61
Tabel 4.10 Hasil Chow test untuk menentukan model <i>common effect</i> atau <i>fixed effect</i>	63
Tabel 4.11 Hasil Hausman Test untuk menentukan model <i>common effect</i> atau <i>fixed effect</i>	63
Tabel 4.12 Hasil Uji T Pada Model Regresi Data Panel.....	65
Tabel 4.13 Hasil uji multikolinearitas pada model regresi	67
Tabel 4.14 Hasil uji glajser pada model regresi data panel.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian 2005-2014.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Grafik Pengeluaran Pemerintah Kabuapten Jember di Sektor Pertanian Tahun 2010-2014	53
Gambar 4.2 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2014.....	55
Gambar 4.3 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014	58
Gambar 4.4 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014	60
Gambar 4.5 Hasil Uji Normallitas	66

DAFTAR LAMPIRAN

A. Data Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2005-2014.....	80
B. Hasil Analisis Regresi Metode	82
B.1 <i>Fixed effect Model</i>	82
B.2 <i>Random Effects Model</i>	83
C. Hasil Uji Penentuan Model Terbaik.....	84
C.1 Uji Chow.....	84
C.2 Uji Hausman Test	85
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	86
D.1 Uji Normallity Test.....	86
D.2 Uji Multikolinearitas	86
D.3 Uji Heteroskedastisitas	87

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dijalankannya kebijakan Desentralisasi, dimana setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola kekayaan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang harus diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya yang merata, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang transparan, efektif dan efisien. Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada ketiga dasar tersebut diperlukan biaya /anggaran dalam merealisasikan program-program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan di daerah pada semua bidang. Namun pemerintah daerah juga harus mengupayakan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, anggaran biaya untuk dekosentrasi dan anggaran tugas pembantuan (Prakarsa : 2014).

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam rangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi menurut Todaro (2000:21), pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan

yang absolut. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1993:44) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana prasarana produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggara pemerintah daerah sebagai sub sistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai nilai PDRB tertinggi kedua di Indonesia. Berikut data PDRB dan Laju PDRB di tiga wilayah pencetak PDRB tertinggi di Indonesia:

Tabel 1.1 PDRB (Miliar Rupiah) & Laju Pertumbuhan PDRB (%)
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Tiga Wilayah Penyumbang PDRB
Tertinggi Tahun 2010-2012

Wilayah	2010		2011		2012	
	PDRB	Laju PDRB	PDRB	Laju PDRB	PDRB	Laju PDRB
DKI Jakarta	394.683,60	6,52%	421.130,50	6,70%	448.838,50	6,50%
Jawa Timur	340.613,70	6,60%	365.152,40	7,20%	393.666,40	7,30%
Jawa Barat	313.190,50	6,41%	334.457,10	6,79%	356.309,60	6,21%

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2012, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki angka PDRB tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, namun besarnya angka PDRB tersebut belum didukung dengan adanya pemerataan pembangunan, hal ini terjadi karena masih terdapat daerah yang masuk dalam daerah kategori tertinggal. Provinsi Jawa Timur masih memiliki empat Kabupaten yang masuk dalam klasifikasi daerah tertinggal diantaranya meliputi Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Bangkalan, dan Kab. Pamekasan (Laporan RPJMN 2010-2014, 2015).

Jawa Timur merupakan daerah industri terbesar di Indonesia sesudah Jabodetabek. Surabaya, ibukota provinsi, memainkan peran penting dalam hal investasi, industri, perdagangan, industri jasa, dan berperan sebagai pintu gerbang bagi ekonomi Indonesia Timur. Sebagian wilayah Jawa Timur sudah dihubungkan dengan jalan tol atau akan dibangun jalan tol dan hampir semua kota dihubungkan dengan jalan kereta api yang menyambung ke hampir seluruh kota-kota di Jawa. Selain itu, kekayaan alam yang melimpah dan kondisi geografis Provinsi Jawa Timur yang strategis menyebabkan ketiga sektor penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur dapat berkembang di provinsi tersebut. Adapun nilai PDRB Provinsi Jawa Timur atas harga konstan dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2000 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Sektor	PDRB Provinsi Jawa Timur (Milyar Rupiah)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	50.208,90	51.329,55	52.628,43	54.463,94	55.330,10
2	Pertambangan dan Penggalian	7.104,82	7.757,32	8.228,63	8.419,51	8.697,63
3	Industri Pengolahan	83.299,89	86.900,78	92.171,19	98.017,06	103.497,23
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.361,52	4.642,08	4.932,08	5.238,43	5.486,50
5	Konstruksi	10.307,88	10.992,60	11.994,83	12.840,57	14.006,02
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	95.983,87	106.229,11	116.645,21	128.375,50	139.431,31
7	Pengangkutan, dan Komunikasi	22.781,53	25.076,42	27.945,26	30.640,91	33.837,74
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	17.395,39	18.659,49	20.186,11	21.782,34	23.455,84
9	Jasa- Jasa	29.417,37	30.693,41	32.251,53	33.884,59	35.686,08
	Jumlah	320.861,17	342.280,76	366.983,27	393.662,85	419.428,45

Sumber Data : BPS Jawa Timur, 2014. Data diolah

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi besar pada PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2013. Kontribusi sektor tersebut dari tahun ke tahun semakin besar. Hal tersebut berbeda dengan sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian cukup besar pada perekonomian Provinsi Jawa Timur, tetapi dari tahun 2009 – 2013 semakin menurun. Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Padahal menurut BPS Jawa Timur (2014), keunggulan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dengan produksinya yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Selain subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan juga lebih unggul dibanding provinsi yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun kontribusi sektor pertanian menurun tetapi sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Eks. Karasidenan Besuki merupakan suatu wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur bagian timur. Wilayah ini terdiri dari empat Kabupaten diantaranya : Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, dan

Kab. Situbondo. Empat kabupaten ini masuk dalam wilayah cluster Agropolitan Ijen. Wilayah Eks. Karasidenan Besuki mempunyai dua Kabupaten yang masuk dalam klasifikasi daerah tertinggal menurut RPJMN tahun 2010-2014. Kriteria daerah tertinggal menurut Kementerian PDT diantaranya meliputi perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, karakteristik daerah (RPJMN 2010-2014, 2015).

Realisasi pembangunan ekonomi dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, sebagai gambaran dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada wilayah Eks. Karasidenan Besuki angka pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten, hanya dua kabupaten yang memiliki angka pertumbuhan yang tergolong baik sedangkan dua kabupaten yang lain memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah. Berikut data tentang Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Eks. Karasidenan Besuki tahun 2006-2012.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks Karasidenan Besuki Tahun 2006-2012

Tahun	Kab. Jember	Kab. Banyuwangi	Kab. Bondowoso	Kab. Situbondo
2006	5,70	5,73	5,56	5,40
2007	5,50	5,28	5,27	5,42
2008	6,08	5,38	5,05	5,08
2009	5,04	5,36	4,96	4,98
2010	6,16	6,26	5,69	5,89
2011	7,00	7,22	6,20	6,23
2012	7,21	7,27	6,45	6,40
Rata-rata	6,09	6,07	5,59	5,62

Sumber Data : BPS Jawa Timur 2013, data diolah

Tabel 1.3 diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota se Eks. Karasidenan Besuki, dimana dalam kurun waktu dari 2006-2012 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab. Jember mencapai 6,09 %, Kab. Banyuwangi mencapai 6,07%, Kab. Situbondo mencapai 5,62%, dan Kab. Bondowoso mencapai 5,59%. Menunjukkan bahwa Kab. Jember mencetak angka rata-rata pertumbuhan tertinggi di Eks. Karasidenan Besuki, disusul Kab. Banyuwangi, Kab Situbondo dan yang paling akhir adalah Kab. Bondowoso. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih memegang peranan dalam peningkatan

perekonomian nasional khususnya di wilayah Eks. Karasidenan Besuki. Selain itu, sebagian besar penduduk di Eks. Karasidenan Besuki masih menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. Hal tersebut menyebabkan peranan sektor pertanian terhadap serapan tenaga kerja masih tinggi. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini merupakan penyedia bahan baku sektor industri pengolahan, sumber pendapatan rumah tangga petani dan penyedia pangan nasional. Maka dari itu pembangunan infrastruktur untuk mempercepat laju pertumbuhan sector pertanian segera harus dilakukan oleh pemangku kebijakan daerah.

Peranan sektor pertanian juga dapat dilihat dari kontribusi secara sektoral pada PDRB, dalam hal ini masing-masing sektoral mempunyai distribusi nilai tambahnya masing-masing pada PDRB, berikut data tentang distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010-2013.

Tabel 1.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013

Tahun	Kab. Jember	Kab. Bondowoso	Kab. Situbondo	Kab. Banyuwangi
2010	39,99	34,39	31,56	47,08
2011	38,73	33,7	31,15	46,21
2012	37,76	33,05	29,99	45,46
2013	36,75	32,16	29,42	44,36
Rata-rata	38,30	33,325	30,53	45,78

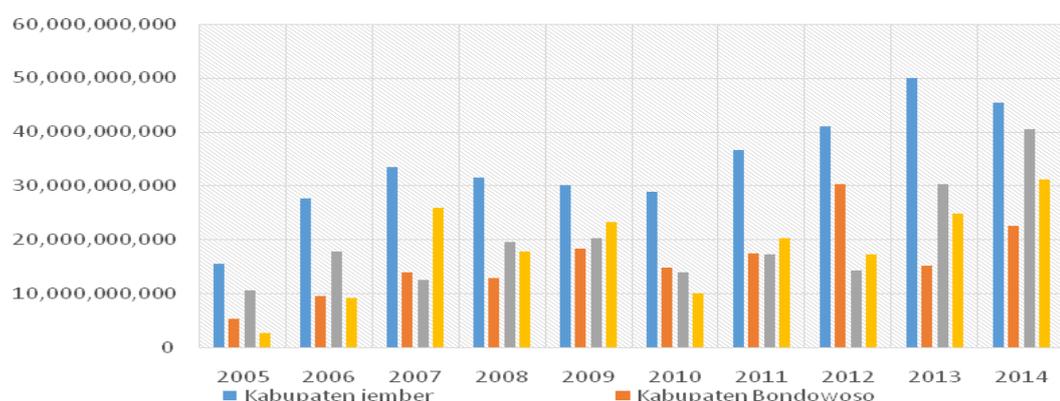
Sumber Data : BPS Jawa Timur 2013, data diolah

Pada Tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa distribusi sektor pertanian di masing-masing Kabuapten di Eks. Karasidenan Besuki. Bisa dikatakan bahwa pada setiap kabupaten kontribusi sektoral pada PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan tersebut bisa diakibatkan adanya pergeseran struktur ekonomi pada masing-masing Kabupaten. Namun jika dibandingkan dengan sektor yang lain, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Eks. Karasidenan Besuki.

Pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah di pengaruhi dari bagian bagian daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam

meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yaitu melalui peningkatan pengeluaran sektor pertanian. Laju pertumbuhan pertanian di tiap daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dalam daerah itu sendiri. Perbedaan kapasitas daerah mempengaruhi besaran PDRB, di mana PDRB merupakan tingkat output yang dapat mengidentifikasi pertumbuhan sektor tersebut. Salah satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian yaitu dengan pendanaan sektor pertanian yaitu pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah dapat mengendalikan melalui instrument kebijakan yang dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya untuk pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh institusi dan kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki TUPOKSI untuk pembangunan sektor pertanian khususnya di Eks. Karasidenan Besuki. Berikut gambaran grafik pengeluaran pemerintah di sektor pertanian.



Sumber : APBD Kabupaten Eks Karesidenan Besuki 2014, data diolah (2014)

Gambar 1.1 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian 2005-2014

Grafik 1.1 diatas menunjukkan total pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian dari masing-masing kabupaten di Eks Karesidenan Besuki. pengeluaran tersebut digunakan untuk belanja program pembangunan di sektor pertanian di tiap kabupaten. Mulai dari tahun 2005-2014 belanja pemerintah daerah cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya seperti yang di gambarkan dalam grafik diatas.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB diwilayah Eks. Karasidenan Besuki. Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, karena belanja untuk pembangunan ditujukan untuk membiayai *Agent Of Development* dan dari pengeluaran ini akan dihasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menjadikan naiknya PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah Eks. Karasidenan Besuki dalam pembangunan ekonomi yang masih belum merata, akan selalu menjadi polemik yang akan terus terjadi dalam suatu daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain apabila pemerintah daerah KAB/Kota di Eks. Karasidenan Besuki, tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewenangannya pada pembangunan di era desentralisasi. dalam rangka mendorong perekonomian untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di sector pertanian. Dalam hal ini PDRB Eks. Karasidenan Besuki. Atas dasar pemaparan tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki ?
2. Seberapa besar pengaruh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian pada PDRB sektor pertanian di Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat tercipta manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan (Pemerintah ataupun pihak Swasta)
3. Bisa menjadi bahan referensi atas penelitian yang sama bagi para peneliti lain dimasa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor juga akan turut meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of nations*, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Inti dari yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang proses pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Pertumbuhan Output Total

Dalam hal ini unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Sumberdaya alam yang tersedia atau faktor produksi
2. Sumberdaya manusia atau jumlah penduduk
3. Stok barang modal yang tersedia

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal, menurut Smith, merupakan unsure produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita. Spesialisasi dan pembagian kerja ini biasa menghasilkan pertumbuhan output, menurut Smith, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan.

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang

pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar adalah pengembangan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Karena pada aliran Keynesian dianggap kurang rinci karena tidak membicarakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dalam teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam jangka panjang (Arsyad, 1999:64-69). Dalam teori ini ada beberapa asumsi yaitu :

- a. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan nasional dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output dan rasio penambahan modal-output.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun, Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Bila diasumsikan terhadap hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal atau K , dengan GNP total atau Y . Jika ditetapkan ratio modal output = k , rasio kecenderungan menabung (MPS) = s yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan

investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka model ekonomi yang sederhana dapat disusun sebagai berikut :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu s , dari pendapatan nasional (Y). Sehingga, hubungan tersebut dapat ditulis dalam persamaan :

$$S = sY$$

2. Investasi neto (I) ditetapkan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga

$$I = \Delta K$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal K , mempunyai hubungan langsung dengan total pendapatan nasional atau output nasional, Y , seperti yang telah ditunjukkan oleh rasio modal output, k , maka :

$$\frac{k}{y} = i$$

Atau

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} = k$$

Dan, Akhirnya

$$\Delta k = k\Delta y$$

3. Akhirnya, mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I), maka persamaan selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I$$

Telah diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan tersebut diketahui bahwa :

$$I = \Delta k = k\Delta y$$

Dengan demikian dapat ditulis identitas tabungan sama dengan investasi sebagai berikut :

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I$$

Dan dapat disederhakan menjadi,

$$sY = c\Delta Y$$

Dengan membagi kedua sisi pada persamaan pertama dengan Y dan kemudian dengan K , dapat diperoleh :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Pada $\frac{\Delta Y}{Y}$, sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP (merupakan, angka presentase perubahan GDP).

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . secara lebih rinci, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni, semakin banyak bagian GDP yang dihasilkan) dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (yakni, semakin besar rasio modal-output nasional atau k , maka semakin rendah pula tingkat pertumbuhan GDP).

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Schumpeter

Pendapat Schumpeter, yang merupakan landasan teori pembangunannya, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam faktor

produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi di sini berarti perbaikan “teknologi” dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. (Lincoln Arsyad, 1997)

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Neo-klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik berkembang sejak tahun 1950 an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Teori neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah adanya unsur kemajuan teknologi dalam model tersebut. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L) pada akhirnya, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif, disebabkan adanya kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga tidak banyak diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah dalam mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi dapat dilihat dari kemampuan meningkatkan

skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas kapital dapat meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu (Arsyad, 1997:57).

Teori neo-klasik menganjurkan agar perekonomian diarahkan menuju pasar sempurna. Karena dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian dapat tumbuh maksimal. Sama halnya dalam perekonomian model klasik, kebijakan yang dapat ditempuh adalah menghapus hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Diperlukan adanya jaminan kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan juga penyebarluasan informasi pasar. Harus tercipta prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Selanjutnya paham neo-klasik menyatakan bahwa untuk dapat mencapai suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), perlu adanya tingkat *saving* yang tinggi dan semua keuntungan pengusaha harus diinvestasikan kembali.

2.1.2 Teori Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat (*sukirno, 2004*). Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: *Pertama; Segi produksi*, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), *Kedua; Segi Pendapatan*, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun,) dan *Ketiga: Segi pengeluaran*, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah

dan lembaga swasta non profit, investasi serta ekspor netto biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Menurut (Gatot Dwi Adiatmojo, 2003) dalam “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin” menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut (H. Saberan, 2002: 5) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: *Pertama*; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, *Kedua*; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, *ketiga*; Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan *Keempat*; Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. *Pertama*; PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha, dan *Kedua*; PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan. Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur

berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan tahun dasar menggunakan tahun 2000. Tahun 2000 digunakan sebagai tahun dasar karena dianggap representative untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tahun 2000 dianggap sebagai tahun yang relative stabil setelah krisis ekonomi 1997/1998. Pada tahun 2000 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92 persen dan inflasi sebesar 9,35 persen. Hal ini merupakan awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi.

Angka –angka pada PDRB dapat dihitung melalui tiga pendapatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsector atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 kelompok lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan

9. Jasa-jasa

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Berdasarkan cara penyajian, menurut BPS, produk Domestik Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a. Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b. Produk Domestik Regional atas dasar harga berlaku

Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud yaitu merupakan nilai yang ditambahkan

kepada barang dan jasa dalam proses produksi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi

PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat (*sukirno, 2004*). Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi macam kelompok peran (Dumairy, 1999) yaitu:

- a. Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatan bias optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya.
- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi disetiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah-wilayah Negara yang bersangkutan

maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil-hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir “pihak” tertentu. Daya tawar (*bargaining position*) antara pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidak seimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

- c. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara aproprri berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.
- d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanteakan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya : atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

Keempat macam peranan pemerintah tadi potensial dapat menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas selaku stabilisator perekonomian daerah, pemerintah harus

mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memacu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

2.1.4 Kebijakan Fiskal dan APBD

Menurut Willam A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit.

Kebijakan fiskal otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang menurut Lipsey dalam Suwanti, (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *otonomus* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut:

a. Pajak

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan disposibel yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi marginal tertentu dari pendapatan disposibel, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional.

b. Pengeluaran pemerintah

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah.

Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional.

Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, semakin kecil kadar ketidak-stabilan siklus pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian.

c. Transfer pemerintah

Transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, Pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang.

Stabilitas ekonomi dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai, jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono, 1992).

Pengeluaran pemerintah menurut Keynes yaitu Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan sumber legitimasi kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari

notasi tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam menentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih dalam Prakarsa, 2004).

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal /Pembangunan.

Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan

dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu Teori Makro yang terdiri dari : (Mangkoesoebroto : 1998)

2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave

Dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional-relatif besar. Tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Selanjutnya tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu pula posisi investasi pihak swasta juga meningkat.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, namun rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

2.1.5.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Adolf Wagner

Wagner melakukan pengamatan terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 yang menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuan oleh Richard Musgrave dinamakan hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*).

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi :

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt-1}{YpCt-1} > \frac{GpCt-2}{YpCt-2} > \dots > \frac{GpCt-n}{YpCt-n}$$

Dimana:

Gpc = Pengeluaran pemerintah perkapita

YpC = Produk atau pendapatan nasional perkapita

T = Indeks waktu

Menurut Wagner ada lima aspek yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu pertama; tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kedua; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, ketiga; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, keempat; perkembangan demokrasi dan kelima adalah ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

2.1.5.3 Peacock dan Wiseman

Mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis "dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah". Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk

membayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan dimaksud.

Konsekuensi yang timbul adalah tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemerintah.

Pengentasan gangguan acap kali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah usai. Saat terjadi gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul efek lainnya yaitu efek inspeksi (*inspection effect*). Postulat efek ini menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut.

Kesadaran semacam ini menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar. Kondisi inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Menjadi catatan dari Teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa adanya toleransi pajak, yaitu suatu

limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25% dari pendapatan nasional. Apabila limit tersebut dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya.

2.1.6 Pengelompokan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Samuelson, 1997).

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 2004)

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian ini dikelompokkan bermacam-macam pengeluaran negara seperti:

- a. Pengeluaran *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, dimana pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
- b. Pengeluaran yang reproduktif, yaitu mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*).
- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif merupakan pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan

kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek tourisme dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.

- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. jika tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu (Dumairy , 2002) :

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui efisiensi dan efektif alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

b. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik

dan non fisik Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*agregat demand / AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di Negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relative terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan.

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson : 1998).

Untuk memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan
- b. Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan
- c. Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana
- d. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif
- e. Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno : 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu maka peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan agregat demand mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive expenditure* yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu – individu untuk kepentingan sosial. Jadi *exhaustive expenditure* mengalihkan faktor – faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa – jasa guru, meliter, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya (*Suparmoko, 2004*).

Sektor pertanian merupakan sektor primer yaitu dimana output dari sektor pertanian akan dijadikan input oleh sektor-sektor lain. Pertanian memiliki peranan penting dalam kontribusi PDRB sehingga keberadaan sektor pertanian perlu

mendapat dukungan khusus dari setiap daerah. Untuk mendukung sektor pertanian maka diperlukan program kegiatan pertanian yang menunjang agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Dalam pelaksanaan program-program tersebut tentunya memerlukan dana dalam pelaksanaan operasional, besaran proporsi dana yang dikeluarkan di sektor pertanian menggambarkan seberapa besar dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Anggaran pengeluaran di sektor pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani karena dapat menjadi intensif para petani agar tidak beralih ke sektor yang lainnya dan sektor pertanian masih tetap berperan penting dalam kegiatan perekonomian. (Mubyarto, 1994).

Fakta lainnya yang dikemukakan oleh Bank Dunia berdasarkan penelitiannya adalah (1) pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan pertanian (2) komposisi dari pengeluaran menentukan dampak yang diberikan, pengeluaran untuk barang-barang publik berdampak positif, sedangkan subsidi untuk input privat cenderung berdampak negatif; (3) untuk kasus Indonesia, pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan, tetapi tergantung dari komposisi pengeluarannya; (4) selama delapan tahun terakhir, pengeluaran untuk pertanian di Indonesia meningkat secara signifikan.

2.1.8 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu

pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (growth) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (employment rate). Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2004) menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (kapital=K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model berikut:

$$Y = A.F(K,L)$$

Di mana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi—yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$Y = (LS + RL) + (KS + RK) + A$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan output (Output growth)
- LS = Kontribusi tenaga kerja (Labor share)
- RL = Pertumbuhan tenaga kerja (Labor growth)
- KS = Kontribusi modal/kapital (Capital share)
- RK = Pertumbuhan modal/kapital (Capital growth)
- A = Teknologi (Technological progress)

Persamaan diatas menunjukkan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input-input tertentu terhadap pertumbuhan output di masing-masing negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara atau provinsi.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku sehingga terbentuk harga agregat ekonomi menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang menambah kesempatan kerja seharusnya dapat mengurangi jumlah penganggur, apabila jumlah angkatan kerjanya tetap. Namun kenyataannya tidaklah demikian; jumlah angkatan kerja terus berkembang yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, maupun mobilitas tenaga kerja.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010”*. Dalam penelitiannya digunakan variabel pengeluaran pemerintah di sector pertanian, tenaga kerja di sector pertanian, dan PDRB di sector pertanian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan menggunakan data panel. Dalam penelitian ditemukan bahwa hasil analisis menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB sektor pertanian yaitu positif tetapi tidak signifikan, Artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB sektor pertanian juga meningkat tetapi tidak memberikan dampak secara langsung, Hasil analisis menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian, hal ini berarti jika tenaga kerja meningkat maka PDRB sektor pertanian meningkat.

Febrian Dwi Prakarsa melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi(Studi Kasus di Kabupaten kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)”*. Dalam penelitiannya di gunakan variabel pertumbuhan

ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja barang dan jasa, belanja modal. Alat analisis yang digunakan adalah dalam penelitian ini memakai regresi berganda dengan metode panel data. Hasil penelitian Dari hasil analisis data panel *Random Effect Model* diperoleh bahwa PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, sementara Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga dipaparkan bagaimana peneliti memberi solusi dan sarannya untuk pemerintah daerah berdasarkan teori yang sudah ada.

Harry A. P. Sitanipessy melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD (Studi kasus Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011)*”. Dalam penelitiannya difokuskan tiga sector utama yang menjadi variabel independen diantaranya sector pertanian, sector perikanan dan keautan, dan sector perdagangan dan industri, dengan variabel dependen PDRB dan PAD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan sederhana untuk empat hipotesis yang diujikan. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sector pertanian, sector perikanan dan kelautan, sector perdagangan dan industri baik secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB, dan PDRB juga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Christi Stella Manoi melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian*”. Dalam penelitiannya digunakan variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen dan variabel PDRB sector pertanian sebagai variabel Dependen. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 80,3 persen PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dengan taraf nyata sebesar 30 persen, sehingga dapat disimpulkan peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian meningkatkan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov (2013)	<i>Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010</i>	Analisis regresi dengan metode panel data	- pengeluaran pemerintah dengan PDRB sektor pertanian yaitu positif tetapi tidak signifikan - hubungan yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian
2	Febrian Dwi Prakarsa (2014)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)	Analisis regresi berganda dengan metode panel data	- PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negative - belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
3	Harry A. P. Sitanipessy (2012)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD (Studi kasus Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011)	analisis regresi berganda dan sederhana	- pengeluaran pemerintah di sector pertanian, sector perikanan dan kelautan, sector perdagangan dan industri baik secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB, dan PDRB juga berpengaruh signifikan

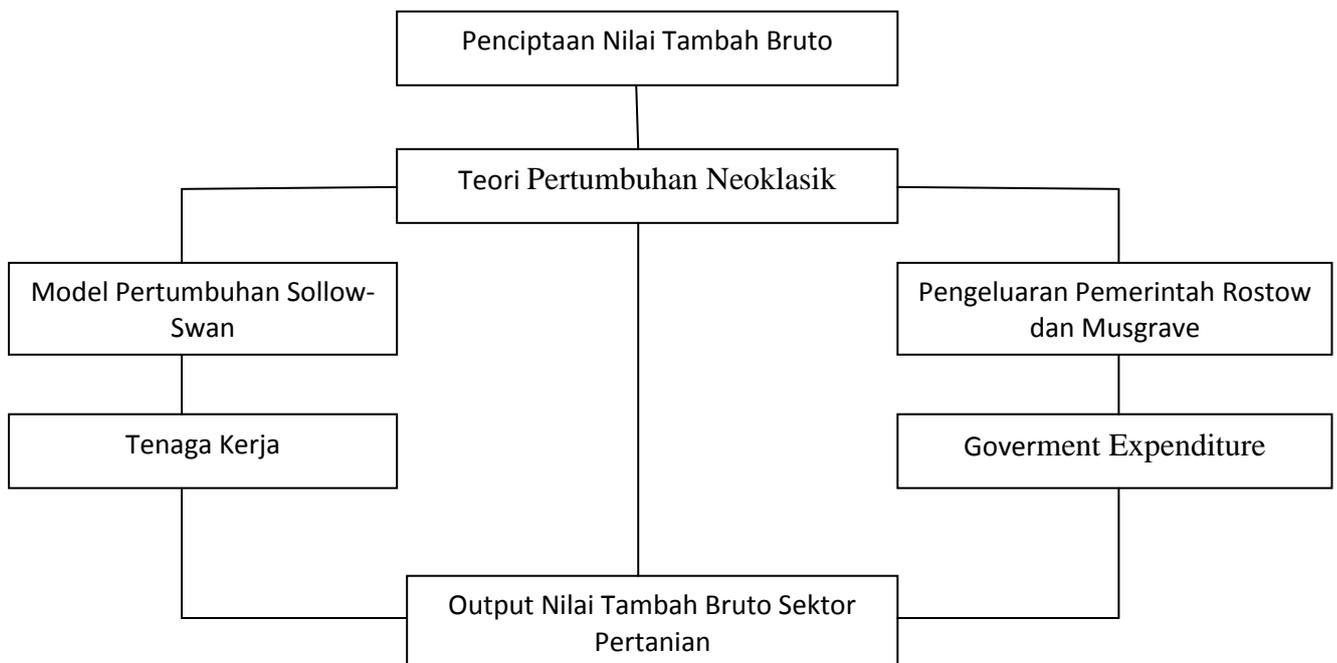
				terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4	Christi Stella Manoi (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Sektor Pertanian	analisis regresi sederhana	- penelitiannya menunjukkan bahwa 80,3 persen PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dengan taraf nyata sebesar 30 persen

Penelitian ini mengacu terhadap penelitian yang sudah tercantum dalam Tabel 2.2 ringkasan penelitian terdahulu dimana tema utama yang diangkat adalah pengaruh pengeluaran pemerintah di sector pertanian terhadap PDRB sektor pertanian dari berbagai alat analisis yang digunakan penulis memakai alat analisis yang memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Alat analisis tersebut adalah analisis regresi berganda dengan pendekatan data panel yang digunakan untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian.

Penelitian terdahulu lebih banyak mengenai produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan variabel pengeluaran pemerintah dengan memfokuskan pada sektor pertanian yang menjadi objek penelitian, meskipun menggunakan variabel yang sama namun pada variabel pengeluaran pemerintah ada perbedaan penentuan sektor pada produk domestik regional bruto. dan dalam penelitian kali ini akan melihat implikasi dari pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian pada objek yang diteliti.

2.3 Kerangka Konseptual

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya yang terlihat dalam dokumen APBD. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai aktifitas pembangunan di setiap sector akan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sector-sektor yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya merupakan sector unggulan yang menjadi penopang perekonomian suatu daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan tercermin pada output domestic suatu daerah yakni akan mendorong PDRB suatu daerah karena PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi. Dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat akan meningkatkan pendapatan dan akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan permintaan atas penyediaan sarana dan prasarana public yang memadai.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam usaha pemecahan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat pendugaan sementara diantaranya:

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah daerah Kab/Kota di sector pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sector pertanian di wilayah Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki.
2. Diduga bahwa Tenaga Kerja Yang bekerja di sector pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian diwilayah Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan penelitian eksplanatori (*Explanatory research*), dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa dan bertujuan memberikan gambaran untuk memahami karakteristik objek dari suatu penelitian dalam beberapa aspek secara sistematis (Singarimbun dan Effendi, 1995).

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian bertempat di wilayah Kabupaten dan Kota Eks. Karasidenan Besuki dengan kurun waktu penelitian dimulai tahun 2005 sampai tahun 2014. Pemilihan wilayah ini karena ingin melihat kembali perkembangan Kabupaten dan Kota Di Eks. Karasidenan Besuki dengan menggunakan sektor unggulan yaitu sector pertanian, maka dari itu pemilihan wilayah ini dianggap nantinya dapat bermanfaat kedepannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain, seperti: buku-buku, literature, catatan-catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, tidak meneliti obyek secara langsung untuk memperoleh data, melainkan mempergunakan data yang telah tersedia.

Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Keuangan Kab/Kota di Eks. Karasidenan Besuki, Badan Pusat Statistik, maupun instansi-instansi terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor pertanian atas dasar harga konstan 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks.Karasidenan besuki tahun 2005-2014

- b. Data Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) pengeluaran pemerintah sektor pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks. Karasidenan Besuki tahun 2005-2014
- c. Data Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks.Karasidenan Besuki tahun 2005-2014

3.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis dan metode dalam menjawab pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah. Alat analisis tersebut antara lain :

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi merupakan Model analisis yang dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada di dalam analisis tersebut ditentukan suatu persamaan yang menaksir sifat hubungan fungsional diantara variabel-variabel yang akan diteliti. Dengan analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari suatu variable atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003).

Adapun model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\text{PDRB} = f(\text{GOV}, \text{TK})$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika, sehingga menjadi :

$$\text{PDRB}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{GOV}_{it-1} + \alpha_2 \text{TK}_{it-1} + \mu_{it}$$

Keterangan :

GOV = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

TK = Tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian

PDRB = PDRB Sektor Pertanian Eks. Karasidenan Besuki

α_0 = Konstanta Persamaan 1

$\alpha_1 - \alpha_2$ = Koefisien Regresi

μ_{it} = komponen error di waktu t untuk unit *cross-section* i

Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka setidaknya ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu Gujarati (2003):

- a. Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode *common effect* atau koefisien tetap antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Ini adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel.
- b. Metode fixed effect atau slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa μ_{it} merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam *constan term* pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun intersepanya sama antar waktu (*timeinvariant*). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.
- c. Metode *random effect* menetapkan μ_{it} sebagai pengganggu spesifik kelompok identik dengan μ_{it} , kecuali terhadap masing-masing kelompok. Namun gambaran tunggal yang memasukkan regresi identik untuk setiap periode. Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS).

3.2.2 Uji Pemilihan Data Panel

Dalam pemilihan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengelola data panel, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu: Uji Chow, Uji Housman dan Uji Lagrange Multiplier.

a. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam *chow test* adalah:

H_0 : model mengikuti *Common Effect* atau *pooled OLS*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan $F_{\text{statistik}}$ dengan F_{tabel} . Perbandingan dipakai apabila hasil $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, berarti model yang paling tepat digunakan adalah Model *FixedEffect*. Begitu sebaliknya, jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common EffectModel* (Widarjono, 2005).

Perhitungan $F_{\text{statistik}}$ didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}}$$

Keterangan :

- SSE1 = Sum Square Error dari model *Common Effect*
- SSE2 = Sum Square Error dari model *Fixed Effect*
- n = Jumlah perusahaan (*cross section*)
- nt = Jumlah *cross section* x jumlah *time series*
- k = Jumlah variabel independen

Sedangkan F_{tabel} didapat dari:

$$F_{\text{tabel}} = \{ \alpha: df(n-1, nt-n-k) \}$$

Keterangan :

- α = Tingkat signifikansi yang dipakai (alpha)
- n = Jumlah perusahaan (*cross section*)
- nt = Jumlah *cross section* x jumlah *time series*
- k = Jumlah variabel independen

Apabila dari hasil *Chow test* ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji dengan *Hausman test*, tetapi apabila dari hasil *Chow test* tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Hausman untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel.

b. Uji Hausman

Setelah selesai melakukan *Chow test* dan didapatkan model yang tepat adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya akan diuji model manakah antara model

Fixed Effect atau *Random Effect* yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai *Hausman test*.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

Ho : model mengikuti *Random Effect*

Ha : model mengikuti *Fixed Effect*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* sebagai berikut:

$$m = \hat{q} \text{Var}(\hat{q}) - 1\hat{q}$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (*LM-test*) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai *residual* dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left[\sum_{t=1}^T e_{it} \right]}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan:

n = jumlah individu

T = jumlah periode waktu

e_{it} = residual metode *Common Effect* (OLS)

Hipotesis yang digunakan adalah:

Ho : model mengikuti *Common Effect Model*

Ha : model mengikuti *Random Effect Model*

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai $LM_{\text{statistik}}$ lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak H_0 , yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai $LM_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima H_0 , yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect* (Widarjono, 2005).

3.2.3 Uji Statistik

Persamaan regresi data panel, selanjutnya dilakukan pengujian statistik, antara lain :

a. Uji F Statistik

Uji $F_{\text{statistik}}$ akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh atau tidak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{\text{statistik}} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Hipotesis :

H_0 : $b_1 = b_2 = 0$ artinya, secara simultan variabel independen GOV dan TK tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq 0$ artinya, secara simultan variabel independen GOV dan TK berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel independen GOV dan TK mempengaruhi variabel dependen PDRB.
2. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas α maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, secara simultan variabel independen GOV dan TK tidak mempengaruhi variabel dependen PDRB.

b. Uji t Statistik

Uji $t_{\text{statistik}}$ digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri (parsial), diuji dengan rumus:

$$t_{\text{statistik}} = \frac{b_i - \beta_i}{Sb_i}$$

Hipotesis :

Ho : $b_1 = b_2 = 0$ artinya, secara parsial variabel independen GOV dan TK tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq 0$ artinya, secara parsial variabel independen GOV dan TK berpengaruh terhadap PDRB.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} < \text{nilai probabilitas } \alpha$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara parsial variabel independen GOV dan TK mempengaruhi variabel dependen PDRB.
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} > \text{nilai probabilitas } \alpha$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara parsial variabel independen GOV dan TK tidak mempengaruhi variabel dependen PDRB.

c. Uji R^2 Koefisien Determinan

Koefisien determinan R^2 untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Semakin dekat angka R^2 mendekati 1 maka semakin baik, karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kurang mampu menjelaskan model.

Koefisien determinasi hanyalah konsep statistik. Sebuah regresi baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bila R^2 rendah regresi kurang baik. Tetapi,

dalam kasus khusus variabel independen (X) mungkin bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen (Y) walaupun kita percaya bahwa X mampu menjelaskan Y.

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi Kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (degree of freedom) dan lebih efisien dan salah satu manfaat yang paling banyak dirasakan oleh para ahli ekonomi dalam menggunakan data panel adalah mengatasi masalah kekurangan data yang tidak dapat dipenuhi oleh data *time series* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:86). Menurut Gujarati, data panel menggunakan metode GLS atau OLS yang sudah ditransformasikan dan memenuhi asumsi model klasik (Gujarati, 2010:472). Dengan adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh metode data panel, maka tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik. (Verbeek, 2000; Gujarati, 2003; Wibisono, 2005; Aulia, 2004 dalam Ajija, dkk. 2011:52). Namun dalam penelitian ini peneliti hanya ingin melihat dan memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik dalam model regresi data panel. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari sebagai berikut :

a. Uji normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Konsep pengujian ini menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* (JB-test). Pedoman dari *JB-test* adalah:

1. Bila nilai $JB_{hitung} >$ nilai X^2_{tabel} atau nilai probabilitas $JB_{hitung} <$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, *error term* adalah berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai $JB_{hitung} <$ nilai X^2_{tabel} nilai probabilitas $JB_{hitung} >$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.

Menurut Gujarati (2012) untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dapat dideteksi melalui:

1. Nilai R^2 tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan
2. Dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari R^2 model utama maka terjadi multikolinieritas.

Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai matrik korelasi untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Apabila nilai matrik korelasi melebihi 80% maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 1999).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*). Dalam Penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-watson. Autokorelasi dapat dilihat dengan tabel Durbin-Watson yang didalamnya terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U). Nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW yang aturannya tertera pada tabel 3.1:

Tabel 3.1. Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik DW	Hasil
$DW < d_L$	Ada autokorelasi positif
$d_L \leq DW \leq d_U$	Tidak ada keputusan
$d_U < DW < 4 - d_U$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
$4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$	Tidak ada keputusan
$DW > 4 - d_L$	Ada auto korelasi negatif

Sumber : Nahrowi dan Usman, 2006:189-192.

d. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa nilai residual (*disturbance term*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastisitas, atau dengan kata lain varians dari residual adalah sama. Jika varians dari residual tidak sama, maka akan muncul permasalahan yang disebut dengan heteroskedastisitas. Permasalahn heteroskedastisitas tidak menyebabkan model menjadi bias, namun menyebabkan model tidak lagi mempunyai varians yang efisien atau yang minimum. Hal ini menyebabkan asumsi best dalm BLUE tidak dapat tercapai.

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam sebuah model, dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glajser. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 diterima yang artinya tidak

terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.

3.3 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang diambil dari kebutuhan data dan alat analisis yang dipergunakan. Definisi operasional adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut diantaranya :

a. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian

Pengeluaran pemerintah disektor pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk membeli barang dan jasa di sektor pertanian, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini data pengeluaran pemerintah menggunakan satuan rupiah (Rp), dan data pengeluaran pemerintah diperoleh dari APBD tahun 2005-2014 di masing-masing Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki

b. Tenaga kerja (TK)

Tenaga kerja merupakan penduduk yang bekerja dan masuk dalam angkatan kerja. Dalam penelitian ini data tenaga kerja di sektor pertanian yang didapat dari Kabupaten Dalam Angka tahun 2005-2014 yang menggambarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

c. Produk Domestik Regional Bruto di Sektor Pertanian

PDRB sektor pertanian merupakan variabel yang di gambarkan dengan nilai konstan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian dengan tahun dasar 2000. Variabel ini menggunakan satuan jutaan rupiah.

Data penelitian ini digunakan PDRB ADHK 2000 tahun 2005-2014 di Kabupaten Eks. Karasidenan Besuki dan Variabel ini menggunakan satuan rupiah.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Eks. Karesidenan Besuki merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian timur. Eks. Karesidenan Besuki terdiri dari empat Kabupaten meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.

4.1.1 Kabupaten Jember

a. Letak geografis

Kabupaten Jember berada pada posisi $6^{\circ}27'9''$ s/d $7^{\circ}14'33''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, samudra hindia di sebelah selatan, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo di sebelah barat daya, dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara. Luas Kabupaten Jember $3.293,34 \text{ Km}^2$ dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C . Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan dan 284 desa dan kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di Eks Karesidenan Besuki. Jumlah penduduk Kabupaten Jember berada pada angka diatas 2 juta jiwa, dimana setiap tahunnya antara tahun 2009 sampai tahun 2013 terjadi kenaikan antara 0,4% hingga 0,6%. Kenaikan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 13.967 jiwa. Sedangkan dalam kurun waktu lima tahun tersebut kenaikan terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya sebesar 4.769 jiwa. Terjadi penurunan pada tahun 2012 tetapi kembali naik pada tahun 2013. Dapat dilihat jumlah penduduk Kabupaten Jember dari tahun 2009 sampai 2013 seperti tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kenaikan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2009	2327957	0	0
2010	2332726	4769	0,20
2011	2345851	13125	0,56
2012	2355283	9432	0,40
2013	2369250	13967	0,59

Sumber : BPS Jember, Data Diolah(2014)

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dapat dilihat melalui jumlah peningkatan PDRB dari tiap tahunnya. Kurun waktu lima tahun terakhir PDRB Kabupaten Jember tidak selalu mengalami kenaikan namun juga mengalami penurunan. Tabel 4.2 akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

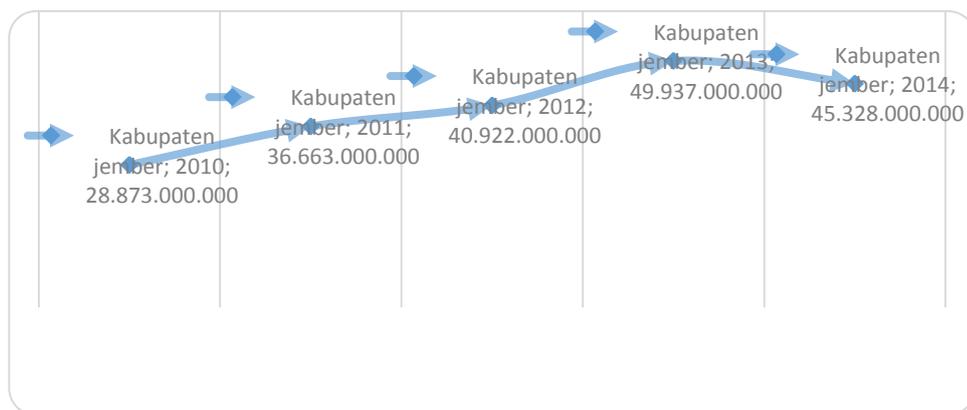
Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	10.891.607,20	5,5
2010	11.550.549,44	6,1
2011	12.359.522,18	7,0
2012	13.250.979,79	7,2
2013	14.165.901,52	6,9

Sumber : BPS Jember, Data Diolah(2014)

Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mengalami kenaikan. Kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat bahwa pada tahun tersebut terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 % pada tahun 2010 dan 0,9 pada tahun 2011. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 0,3 %.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Jember

Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Jember yang dialokasikan dan digunakan untuk belanja program pembangunan pada sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun mengalami tergelong paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Eks karesidenan Besuki. berikut grafik 4.1 pengeluaran pemerintah di sektor pertanian Kabupaten Jember.



Sumber : APBD Kabupaten Jember, data diolah (2014)

Gambar 4.1 Grafik Pengeluaran Pemerintah Kabuapten Jember di Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 pengeluaran pemerintah Kabupaten Jember mengalami kenaikan dalam pembelanjaan di sektor pertaniannya. Tetapi pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah Kabupaten Jember mengalami penurunan yang pada tahun 2013 total belanja mencapai 49 milyar rupiah namun menjadi 45 milyar rupiah.

4.1.2 Kabupaten Bondowoso

a. Letak Geografis

Kabupaten Bondowoso merupakan satu-satunya wilayah di Eks Karesidenan Besuki yang tidak memiliki wilayah pesisir dikarenakan berada ditengah dan diapit oleh beberapa Kabupaten. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS. Batas wilayah Kabupaten Bondowoso sebelah utara dan barat langsung berbatasan dengan kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatassan dengan Kabupaten Banyuwangi,

dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 73 sampai 3287 meter diatas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 23 kecamatan dan 209 desa dan kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Kabupaten Bondowoso memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari pada Kabupaten Jember, jumlah penduduknya berkisar antara 700 ribu jiwa. Berikut tabel 4.3 yang menggambarkan jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 beserta dengan pertumbuhannya.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kenaikan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2009	740291	0	0
2010	740737	446	0,06
2011	745267	4530	0,61
2012	745948	681	0,09
2013	752800	6852	0,92

Sumber : BPS Bondowoso, Data Diolah(2014)

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama kurun waktu lima tahun kenaikan jumlah penduduk mengalami fluktuasi. Kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6.852, hal ini merupakan kenaikan terbesar selama kurun waktu lima tahun. Sedangkan kenaikan terkecil pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,06 %.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perkonomian Kabupaten Bondowoso dapat dilihat melalui hasil dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam ketegori wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Berikut Tabel 4.4 menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso dari pertumbuhan PDRB setiap tahunnya

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso

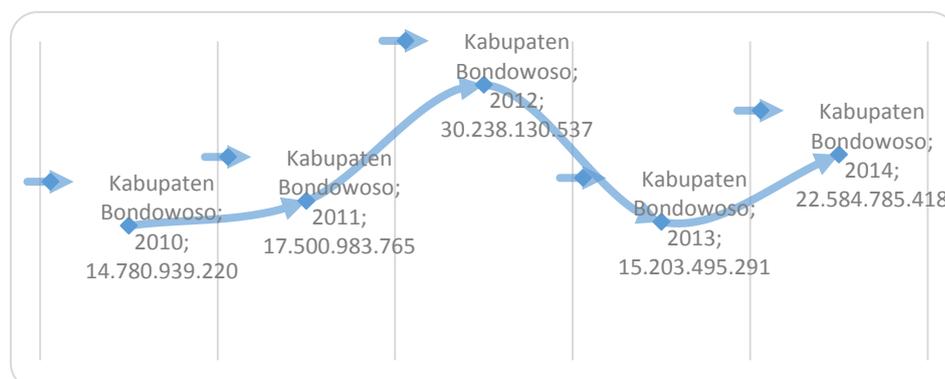
Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	2.978.906,80	5,2
2010	3.146.982,26	5,8
2011	3.341.964,11	6,3
2012	3.557.683,76	6,5
2013	3.780.574,42	6,9

Sumber : BPS Bondowoso, Data Diolah(2014)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso berkisar antara 5,2% sampai 6,9%, apabila dibandingkan dengan kabupaten Jember, pada tahun 2013 hanya kabupaten Bondowoso yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 5,2% dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,6% menjadi 5,8 %.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor pertanian kabupaten Bondowoso

Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso lebih kecil dibandingkan Kabupaten Jember. Dalam kurun waktu lima tahun total pengeluaran pemerintah disektor pertanian di Kabupaten Bondowoso terbilang fluktuatif di setiap tahunnya. Berikut grafik 4.2 pengeluaran pemerintah di sektor pertanian Kabupaten Bondowoso.



Sumber : APBD Kabupaten Bondowoso, data diolah (2014)

Gambar 4.2 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Bondowoso tahun 2010-2014

Pada grafik diatas bisa dilihat bahwa total pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso di sektor pertanian, pada tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan yang tinggi yakni dari 14 milyar sampai 30 milyar rupiah. Namun pada tahun 2014 mengalmi penurunan menjadi 15 milyar, dan naik kembali pada tahun 2014 sebesar 22 milyar rupiah.

4.1.3 Kabupaten Situbondo

a. Letak Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah pantai utara Pulau Jawa. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai pada wilayah administratifnya. Posisi ini antara $7^{\circ}35'$ – $7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ – $114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Secara administratif wilayah ini dibagi menjadi 17 kecamatan dengan 132 desa dan 4 kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Situbondo relatif lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Meski memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan Kabupaten Bondowoso, penduduk Kabupaten Situbondo masih lebih sedikit. Tahun 2013 jumlah penduduk di wilayah ini hanya sebesar 660.702 ribu jiwa saja. Berikut tabel 4.5 yang menggambarkan jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kenaikan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2009	643061	0	
2010	647619	4558	0,71
2011	652042	4423	0,68
2012	656691	4649	0,71
2013	660702	4011	0,61

Sumber : BPS Situbondo, Data Diolah(2014)

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar 0,71% dengan jumlah penduduk mencapai 647.619 ribu jiwa, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 0,68% menjadi 652.042 ribu jiwa. Mengalami kenaikan lagi pada tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 0,71% namun pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 0,61%.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo relatif lebih kecil dari pada Kabupaten Jember dan Bondowoso, meski besarnya PDRB lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Bondowoso namun dalam hal peningkatan pertumbuhan masih jauh dengan kabupaten Bondowoso. Berikut tabel 4.6 yang menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonommi Kabupaten Situbondo.

Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo

Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	3.330.419,83	5,0
2010	3.522.055,33	5,6
2011	3.744.411,60	6,2
2012	3.989.292,96	6,5
2013	4.263.528,37	6,3

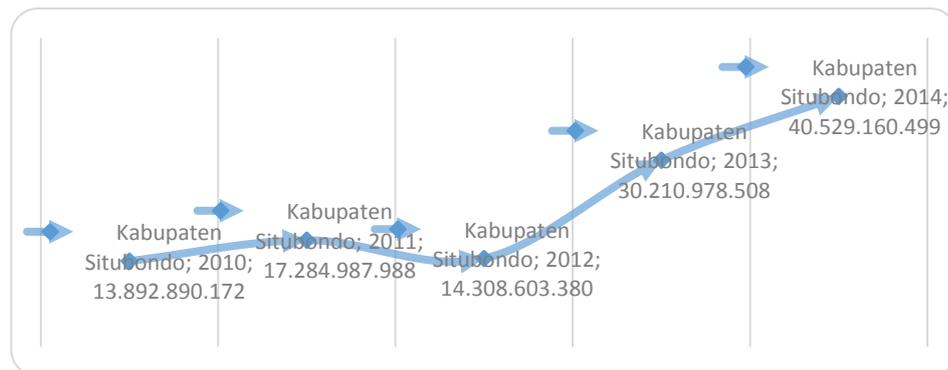
Sumber : BPS Situbondo, Data Diolah(2014)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo dari tahun 2009 sampai tahun 2012 memiliki tren yang positif meskipun peningkatannya relatif kecil. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi wilayah ini sebesar 5,0% dengan angka PDRB sebesar 3.330.419,83. Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 5,6%, dan pada tahun 2011 naik lagi sebesar 6,2%. Dalam kurun waktu tersebut kanaikan berhenti pada tahun 2012 yakni sebesar 6,5% dengan besarnya PDRB 3.989.292,96. Setelah itu mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2013.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor pertanian Kabupaten Situbondo

Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Situbondo di sektor pertanian tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember. Tetapi masih bisa

dikatakan tergolong tinggi sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso, pada sektor pertaniannya total pengeluarannya fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun. Berikut grafik 4.3 pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Situbondo di sektor pertanian pada tahun 2010-2014.



Sumber : APBD Kabupaten Situbondo, data diolah (2014)

Gambar 4.3 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami kenaikan dari 13 milyar sampai 17 milyar. Tetapi pada tahun 2012 total pengeluaran pemerintah sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 14 milyar, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 total pengeluaran pemerintah sektor pertanian mengalami kenaikan yang tinggi yakni sebesar 30 milyar sampai dengan 40 milyar rupiah.

4.1.4 Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang berada paling timur di Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini berada pada posisi 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.782,50 km² yang merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 24 kecamatan dan 217 desa dan kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 1,5 juta jiwa lebih. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 20.377 jiwa atau sekitar 0,013%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya 4.065 jiwa saja. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2011, berawal dari tahun 2010 kenaikan mencapai 20.337 jiwa, pada tahun 2011 hanya sebesar 8.755 jiwa. Tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 1.574.778. berikut tabel gambaran keadaan penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kenaikan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2009	1535701	0	
2010	1556078	20377	1,33
2011	1564833	8755	0,56
2012	1568898	4065	0,26
2013	1574778	5880	0,37

Sumber : BPS Banyuwangi, Data Diolah(2014)

c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Selama kurun waktu lima tahun penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013. Berikut tabel gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2009-2013

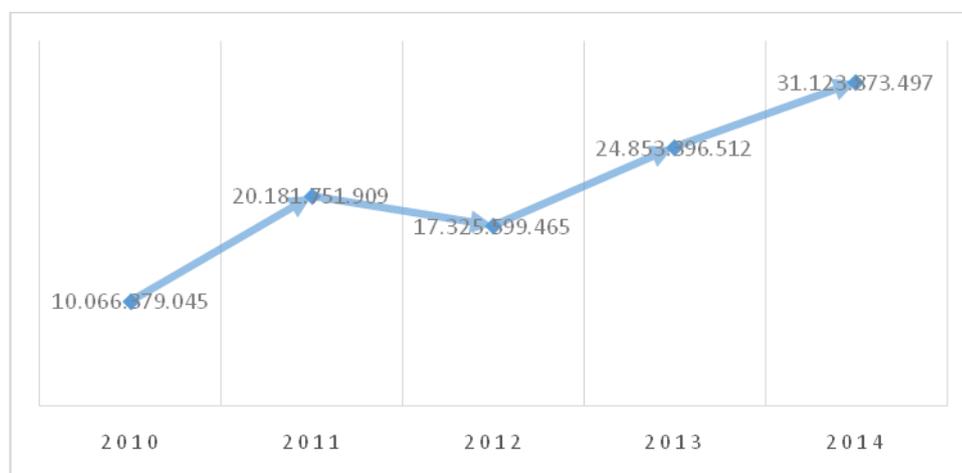
Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	10.370.286,20	6,0
2010	11.015.195,17	6,2
2011	11.804.189,97	7,2
2012	12.655.586,32	7,2
2013	13.511.707,90	6,8

Sumber : BPS Banyuwangi, Data Diolah(2014)

Tabel diatas menggambarkan pada tahun 2009 sampai tahun 2011 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang beragam mulai dari 0,2% sampai 1%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 yang mengalami kenaikan sebesar 1%, namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi cenderung stagnan pada titik 7,2%. Tahun 2013 terjadi penurunan kembali sebesar 0,4% dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi menjadi 6,8%.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi

Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi di sektor pertanian bisa dikatakan besar bahkan hampir menyamai Kabupaten Jember dan masih lebih besar dibandingkan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo dari segi total pengeluaran belanja di sektor pertanian. Dalam kurun waktu lima tahun total pengeluarannya mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Berikut grafik 4.4 pengeluaran pemerintah sektor pertanian Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014



Sumber : APBD Kabupaten Banyuwangi, data diolah (2014)

Gambar 4.4 Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014

Pada Kabupaten Banyuwangi total pengeluaran belanja di sektor pertanian yang tergolong tinggi. Hal ini bisa dilihat dari besaran pengeluaran belanja yang mencapai 31 milyar. Pada tahun 2010 sampai 2011 total pengeluaran

belanja sektor pertanian mengalami kenaikan dari 10 milyar sampai 20 milyar rupiah. Tetapi pada tahun 2012 total belanja mengalami penurunan menjadi 17 milyar. Total pengeluaran belanja di sektor pertanian kembali naik terjadi pada tahun 2013 sampai 2014 yakni mencapai 24 milyar dan 31 milyar rupiah.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Besuki

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen (Y) dengan memakai data pada variabel independen (X) yang sudah diketahui nilai besarnya (Gujarati,2004:19). Untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah disektor pertanian dan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto di Eks Karesidenan Besuki digunakanlah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode data panel. Hasil regresi linear berganda data panel, pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap pdrb sektor pertanian di Eks karesidenan Besuki dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*
Variabel Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja
Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Dependent Variable: PDRB
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2005 2014
Included observations: 10
Cross-sections included: 4
Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.706275	2.834231	0.249195	0.8047
GOV?	0.438893	0.169492	2.589455	0.0140
TK?	1.344591	0.559409	2.403592	0.0218
Fixed Effects (Cross)				
_JEMBER--C	-0.175976			
_BONDOWOSO--C	-0.088790			
_SITUBONDO--C	-0.150343			
_BANYUWANGI--C	0.415108			

Effects Specification

R-squared	0.759496	Mean dependent var	12.55475
Adjusted R-squared	0.724128	S.D. dependent var	0.393498

Substituted Coefficients:

$$PDRB = 0.70627494887 + 0.438892920819*GOV + 1.34459059294*TK$$

Sumber : Lampiran B. Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda data panel :

$$PDRB = 0.70627494887 + 0.438892920819*GOV + 1.34459059294*TK + \mu$$

Berikut ini adalah penjelasan secara detail dari Persamaan regresi tabel 4.9 :

1. Nilai konstanta sebesar 0.70627494887. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di sektor pertanian sebesar 0.70627494887 juta rupiah setiap tahunnya, apabila variabel pengeluaran pemerintah disektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian dianggap konstan.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 0.438892920819 artinya, apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah disektor pertanian sebesar satu juta rupiah, maka akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.438892920819 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Pengaruh tenaga kerja di sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 1.34459059294 artinya, apabila terjadi peningkatan tenaga kerja sektor pertanian sebesar satu juta jiwa, maka akan menaikkan PDRB sektor pertanian sebesar 1.34459059294 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam *chow test* adalah sebagai berikut :

Ho : model mengikuti *Common Effect* atau *pooled OLS*

Ha : model mengikuti *Fixed Effect*

Tabel 4.10 Hasil Chow test untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.804710	(3,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	36.374971	3	0.0000

Sumber: Lampiran C. Data diolah

Hasil Uji Chow dapat dilihat dari besarnya nilai Probabilitas chi-square $0,0000 < \text{tingkat signifikan } (\alpha = 0,05)$, artinya menolak H_0 dan menerima H_a , maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

b. Uji Hausman Test

Setelah selesai melakukan *Chow test* dan didapatkan model yang tepat adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya akan diuji model manakah antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai *Hausman test*.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Tabel 4.11 Hasil Hausman Test untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.821173	2	0.0440

Sumber : Lampiran C, data diolah

Hasil uji *Housman test* menunjukkan besarnya nilai probabilitas chi-square $0,0440 < \text{tingkat signifikan } (\alpha = 0,05)$, artinya menolak H_0 dan menerima H_a , maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

c. Uji Lagrangge Mutiplier

Analisis ini tidak menggunakan *LM-test*, di karenakan pada hasil *Chow test* dan *Hausman test* menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*. *LM-test* hanya digunakan apabila pada *Chow test* menunjukan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada *Hausman test* menunjukan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*, sehingga perlu ditentukan model mana diantara keduanya yang paling tepat.

4.2.3 Hasil Uji Statistik

Setelah melakukan estimasi persamaan regresi linear berganda dan memilih model yang baik untuk mengestimasi data panel, selanjutnya dilakukan pengujian statistik, yang diantaranya adalah : (a) Uji $F_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara simultan), (b) Uji $t_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara parsial) dan (c) Uji R^2 (uji koefisien determinan).

a. Uji $F_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara simultan)

Uji $F_{\text{statistik}}$ digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama terhadap variabel dependen pada model. Hasil regresi data panel *fixed effect* menunjukkan probabilitas $F_{\text{statistik}} = 0.000000 \leq \text{nilai probabilitas } (\alpha = 0,05)$, berarti H_a diterima yang artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau secara simultan variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel PDRB.

b. Uji $t_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara parsial)

Uji $t_{\text{statistik}}$ digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji $t_{\text{statistik}}$ menunjukkan bahwa pada semua variabel independen berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap

perubahan nilai variabel dependen. Berikut tabel hasil uji $t_{\text{statistik}}$ pada model regresi data panel.

Tabel 4.12 Hasil Uji T Pada Model Regresi Data Panel

Variabel	Nilai Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Pengeluaran Pemerintah (GOV)	0,0140	0,05	Signifikan
Tenaga Kerja (TK)	0,0218	0,05	Signifikan

Sumber : Lampiran B, data diolah

c. Hasil Uji R^2 (uji koefisien determinan)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil estimasi pada model regresi menunjukkan nilai $R^2 = 0.759496$, artinya bahwa PDRB di Eks Karesidenan Besuki dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 75,95% sedangkan sisanya sebesar 24,05% dijelaskan variabel lain di luar model regresi.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

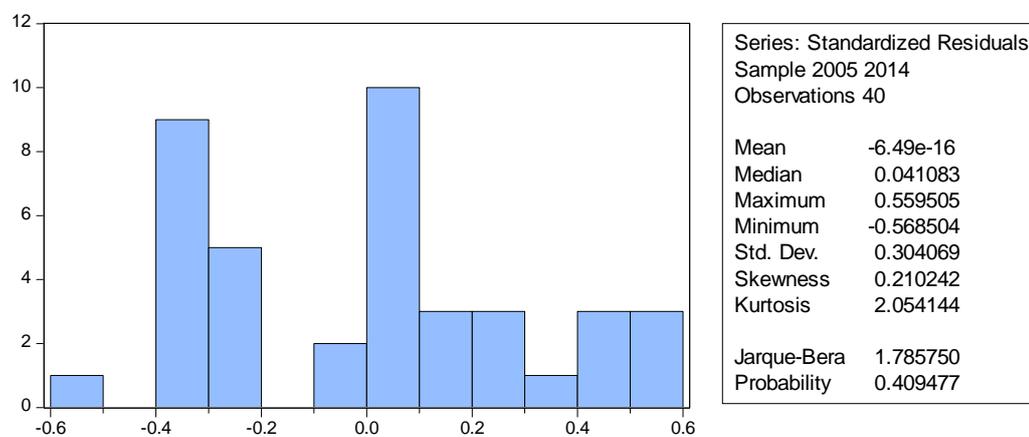
Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi Kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya ingin melihat dan

memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik dalam model regresi data panel.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual pada model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* yaitu untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil *JB-Test* dapat dilihat pada gambar.



Sumber : Lampiran D, data diolah

Gambar 4.5 Uji Normalitas

Berdasarkan nilai probabilitas X^2 sebesar $0,409477 \geq$ nilai probabilitas ($\alpha = 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut berdistribusi normal karena nilai probabilitas X^2 hitung lebih besar dibanding nilai probabilitas $\alpha = 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas terjadi apabila terdapat hubungan linear antar variabel atau terdapat korelasi antar variabel independen, Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat matrik korelasinya. Jika masing-masing variabel independen berkorelasi lebih besar dari pada 80% maka terdapat penyakit multikolinearitas (wardhono, 2004). Berikut tabel hasil uji multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 4.13 Hasil uji multikolinearitas pada model regresi

	<i>PDRB</i>	<i>GOV</i>	<i>TK</i>
<i>PDRB</i>	1.000000	0.466677	0.625070
<i>GOV</i>	0.466677	1.000000	0.606233
<i>TK</i>	0.625070	0.606233	1.000000

Sumber : Lampiran D, data diolah

Hasil matrik korelasi memperlihatkan bahwa hubungan antara semua variabel independen berada di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi data panel.

c. Uji Autokolerasi

Autokolerasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah terjadi pada data yang bersifat runtut waktu (*time series*), dikarenakan berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya. Namun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi terjadi pada data yang bersifat antar individu (*cross section*).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model dapat dilihat melalui nilai besaran Durbin-Watson. Hasil regresi data panel metode *fixed effect* nilai Durbin-Watson sebesar 0,874840. Asumsi bahwa tidak terjadi autokorelasi yaitu apabila $0 < dw < dl$ lebih jelasnya dapat dilihat perhitungan dibawah ini:

$$\text{Diketahui : } Dw = 0,874840$$

$$0 < dw < dl$$

$$0 < 0,874840 < 1,3908$$

Karena nilai 0 lebih kecil dari nilai Durbin-Watson dan lebih kecil dari nilai durbin low (*d*) maka model regresi data panel terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi data panel. Konsekuensi logis dari adanya heteroskedastisitas ialah bahwa

penaksiran tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksiran tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar.

Pada uji heteroskeastisitas digunakan metode uji Gleser, dimana uji ini memiliki kesamaan dengan uji Park namun perbedaannya hanya pada variabel dependennya. Pada uji glajser variabel diganti dengan nilai absolute residual (*RESABS*). Berikut hasil uji glajser pada model regresi data panel.

Tabel 4.14 Hasil uji glajser pada model regresi data panel

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2005 2014
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.207725	1.207838	-0.171980	0.8645
GOV	-0.082464	0.072231	-1.141669	0.2616
TK	0.224732	0.238398	0.942674	0.3525

Effects Specification

Sumber : Lampiran D, data diolah

Hasil uji glajser menunjukkan bahwa nilai besaran probabilitas dari variabel GOV sebesar $0.2616 > 0.05$ dan variabel TK sebesar $0.3525 > 0.05$. dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas variabel lebih besar dari nilai α , artinya dalam model regresi data panel tidak ada heteroskedastisitas.

4.3 Pembahasan

Laju pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah di pengaruhi dari bagian bagian daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yaitu melalui peningkatan pengeluaran sektor pertanian. Laju pertumbuhan pertanian di tiap daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dalam daerah itu sendiri. Perbedaan kapasitas daerah mempengaruhi besaran PDRB, di mana PDRB merupakan tingkat output yang dapat mengidentifikasi pertumbuhan sektor tersebut. Salah

satu upaya peningkatan PDRB sektor pertanian yaitu dengan pendanaan sektor pertanian yaitu melalui pengeluaran pemerintah.

Hasil regresi data panel *fixed effect* menunjukkan probabilitas $F_{\text{statistik}} 0.000000 \leq$ nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), yang berarti H_0 diterima yang artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau secara simultan variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel PDRB. Hasil uji $t_{\text{statistik}}$ juga menunjukkan bahwa pada semua variabel independen berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dimana probabilitas $t_{\text{statistik}}$ lebih besar dibanding $\alpha = 0,05$ pada model regresi data panel.

Hasil estimasi pada model regresi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.759496, artinya bahwa PDRB sektor pertanian di Eks Karesidenan Besuki dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 75,95% sedangkan sisanya sebesar 24,05% dijelaskan variabel lain di luar model regresi.

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah dapat mengendalikan melalui instrument kebijakan fiskal yang dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya untuk pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program-program yang telah dirancang oleh institusi dan kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki TUPOKSI untuk pembangunan sektor pertanian khususnya di Eks. Karasidenan Besuki.

4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil uji regresi data panel didapati variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian,

hal ini ditunjukkan dengan hasil dari uji parsial variabel. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian mempunyai andil dalam meningkatnya nilai tambah bruto pada sektor pertanian.

Peranan pemerintah di Eks. Karesidenan Besuki dalam pembangunan bisa dilihat dari belanja pembangunan yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pembangunannya. Dalam hal ini sektor pertanian di Eks. Karesidenan Besuki masih bergantung pada peran pemerintah dalam pembiayaan untuk pengembangan sektor pertanian. Padahal jika dilihat dari rata-rata kontribusi sektor pertanian pada PDRB relatif masih lebih baik dari sektor-sektor yang lain dalam PDRB dan ini bisa dikategorikan sebagai sektor unggulan di Eks. Karesidenan Besuki.

Seperti yang dikemukakan Keynes bahwa pengeluaran pemerintah merupakan identitas dari keseimbangan pendapatan nasional, yang menjadi legitimasi kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Artinya bahwa naik dan turunnya pengeluaran pemerintah juga akan menaikkan dan menurunkan pendapatan agregat. Peranan pengeluaran pemerintah di Negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relative terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Dalam hal ini jika pemerintah daerah wilayah Eks karesidenan Besuki menaikkan pengeluarannya di sektor pertanian maka akan meningkatkan PDRB sektor pertanian di Wilayah Eks Karesidenan Besuki.

4.3.2 Pengeruh Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan pada PDRB sektor pertanian. Artinya bahwa naik atau turunnya tenaga kerja disektor pertanian maka akan mempengaruhi nilai tambah bruto pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan pada wilayah Eks. Karesidenan Besuki sektor pertanian masih belum maju sepenuhnya artinya bahwa teknologi dibidang pertanian masih belum baik, dan sektor pertanian masih bergantung pada sumberdaya manusia. Sehingga peran sumber

daya manusia masih sangat besar dalam penciptaan nilai tambah bruto di sektor pertanian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh suwanti (2013), menyatakan bahwa tenaga kerja pada sektor pertanian memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Peran tenaga kerja dalam sektor pertanian memiliki andil besar dalam penciptaan nilai tambah bruto, dalam hal ini pembangunan di sektor pertanian harus di upayakan untuk terus menciptakan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang pertanian.

Hal ini sesuai dengan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang pertumbuhan ekonomi pada fungsi produksi agregat menyatakan bahwa ouput nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (kapital= K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

4.3.3 Koefisien Masing-masing Wilayah di Eks. Karesidenan Besuki

Dalam penelitian ini dapat digambarkan karakteristik masing-masing wilayah berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan melihat koefisien masing-masing wilayah.

a. Kabupaten Jember

Pada Kabupaten Jember didapati koefisien hasil regresi sebesar 0.175976. juta rupiah hasil tersebut merupakan nilai tambah bruto di sektor pertanian Kabupaten Jember. Dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap, kabupaten Jember memiliki sekian potensi yang mendukung untuk berkembangnya sektor pertanian, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja pemerintahnya agar supaya sektor sektor pertanian dapat berkembang pesat. Pengembangan dalam sektor pertanian harus dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.

b. Kabupaten Bondowoso

Pada Kabupaten Bondowoso koefisien hasil regresi data panel menunjukkan besaran angka yakni 0.088790 juta rupiah. Hasil tersebut

merupakan nilai tambah bruto di sektor pertanian Kabupaten Bondowoso. Dengan sumsi variabel lainnya dianggap tetap. Hasil tersebut masih lebih kecil dibanding dengan Kabupaten Jember, perbedaan hasil dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dari Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

c. Kabupaten Situbondo

Pada Kabupaten Situbondo koefisien hasil regresi data panel menunjukkan besaran angka yakni 0.150343 juta rupiah setiap tahunnya. Hasil ini merupakan nilai tambah bruto sektor pertanian di Kabupaten Situbondo. Berbeda dengan Kabupaten Bondowoso, nilai tambah bruto sektor pertanian di Kabupaten Situbondo masih lebih besar dari Kabupaten Bondowoso. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan variabel-variabel penentu penciptaan nilai tambah bruto pada sektor pertanian.

d. Kabupaten Banyuwangi

Pada Kabupaten Banyuwangi didapati hasil koefisien wilayah sebesar 0.415108 juta rupiah, hasil ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tiga kabupaten yang ada di Eks. Karasidenan Besuki, Kabupaten Banyuwangi secara potensi kewilayahan memang sangat baik untuk dilakukan pengembangan sektor pertanian. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya modal yang tercukupi

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah pada era desentralisasi memang sangat vital bagi perkembangan suatu daerah. Keberlanjutan pembangunan tidak hanya dilihat atau diukur dengan pertumbuhan ekonomi saja namun ada aspek yang lain yang harus diperhatikan salah satunya adalah kemiskinan dan pengangguran. Peran pemerintah daerah dapat melakukan fungsi alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatan bias optimal dan mendukung efisiensi produksi. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan di berbagai sektor khususnya pada sektor pertanian.

Sektor pertanian di Eks Karesidenan Besuki harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah, pembangunan dan pengembangan pada sektor pertanian harus terus dilakukan, melihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor primer yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Dukungan melalui anggaran belanja di sektor pertanian harus terus ditingkatkan. Pemberdayaan, permodalan, dan pengembangan teknologi pertanian menjadi kebutuhan pokok di sektor pertanian dan ini masih belum terealisasi secara menyeluruh. Untuk itu agar sektor pertanian dapat berkembang dan memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian, pemerintah harus terus memberikan dukungan melalui anggaran belanja yang signifikan untuk pertumbuhan sektor pertanian.

Sektor pertanian di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak hanya butuh anggaran belanja dari pemerintah, namun ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam bidang pertanian juga harus disediakan. Manajemen pengelolaan di bidang pertanian juga masih kurang baik mulai dari petani, kelembagaan tani, dan pasar. Seringkali banyak merugikan para petani. Untuk itu ketersediaan sumber daya alam yang unggul dan kompeten dalam bidang pertanian harus dipenuhi dan menjadi tugas bersama bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Eks Karesidenan Besuki.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap peningkatan produk domestik regional bruto di wilayah Eks. Karesidenan Besuki. Dalam penelitian ini dilakukan proses estimasi model dan interpretasi model menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan :

1. Hasil regresi data panel pendekatan *fixed effect model* untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto di wilayah Eks. Karesidenan Besuki. berdasarkan hasil uji parsial parsial pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto di wilayah Eks Karesidenan Besuki.
2. Hasil regresi data panel pendekatan *fixed effect model* untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto di wilayah Eks Karesidenan Besuki. berdasarkan hasil uji simultan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah di Eks Karesidenan Besuki perlu meningkatkan pengeluaran belanja pembangunan di sektor pertanian. Pembangunan di sektor pertanian dapat berupa program pemberdayaan di bidang pertanian, program pembangunan infrastruktur pertanian dan program pengembangan teknologi pertanian,

sehingga sektor pertanian dapat berkembang pesat dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di kabupaten wilayah Eks Karesidenan Besuki.

2. Pemerintah daerah di Eks Karesidenan Besuki juga perlu melakukan pengembangan tenaga kerja di sektor pertanian, dalam hal ini tenaga kerja di sektor pertanian tidak hanya bertambah secara jumlah, namun juga harus diperhatikan secara kualitas individu yang bekerja dan membidangi sektor pertanian. Kemandirian petani dan penguasaan teknologi pertanian harus dimiliki setiap masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mampu berkontribusi pada perekonomian Eks Karesidenan Besuki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatmojo, Dwi Gatot, 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jakarta
- Ajija, Shochrul R et al. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat: Jakarta.
- Arsyad, Lincyolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan Edisi 3*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2014 a. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jember 2005-2014*. Katalog BPS. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- _____. 2014 b. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Bondowoso 2005-2014*. Katalog BPS. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2014 c. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Situbondo 2005-2014*. Katalog BPS. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- _____. 2014 d. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Banyuwangi 2005-2014*. Katalog BPS. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2014 e. *Kecamatan Dalam Angka Kabupaten/Kota Jember 2005-2014*. Katalog BPS. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- _____. 2014 f. *Kecamatan Dalam Angka Kabupaten/Kota Bondowoso 2005-2014*. Katalog BPS. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2014 g. *Kecamatan Dalam Angka Kabupaten/Kota Situbondo 2005-2014*. Katalog BPS. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- _____. 2014 h. *Kecamatan Dalam Angka Kabupaten/Kota Banyuwangi 2005-2014*. Katalog BPS. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- BAPPEDA. 2014 a. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jember 2005-2014*. BAPPEDA Kabupaten Jember.

- _____. 2014 b. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jember 2005-2014*. BAPPEDA Kabupaten Jember.
- _____. 2014 c. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Bondowoso 2005-2014*. BAPPEDA Kabupaten Bondowoso.
- _____. 2014 d. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Situbondo 2005-2014*. BAPPEDA Kabupaten Situbondo.
- _____. 2014 e. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Banyuwangi 2005-2014*. BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- _____, 1993, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- _____, 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- _____, 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dornbusch, R. dan Fisher, S., 2004. *Macroekonomi*, Edisi Keempat, Alih Bahasa Mulyadi, JA, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daryanto, Arif dan Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*, Edisi Pertama, Terjemahan oleh Sumarno Zain, Penrbit Erlangga, Jakarta.
- _____. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- _____. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta, Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

- _____. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*.
Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Penetapan Daerah Tertinggal)*. Jakarta.
- Lipsey, Richard G. 1990. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lee, Robert D. Jr. and Ronald W. Johnson. 1998. *Public Budgeting Systems*. Sixth edition. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc.
- Lathiefunnisa, Azharia, 2014. *Analisis Penetapan-Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang*. Skripsi. Universitas Jember.
- Mc Eachern, William. 2000. *Ekonomi Makro-Pendekatan Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mubyarto, 1994, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mangkoessoebroto, G. 1998. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta :BPFE.
- Prakarsa, Febrian Dwi, 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Saberan.H, 2002. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Rajawali.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1997. *Makro-Ekonomi, Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, S, 2004. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : Jakarta Press.
- Suparmoko, 2004. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta:BPFE.
- Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov, 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010*. Journal Of Economic vol. 02- No. 04, Universitas Diponegoro.

- Sitaniapessy, Harry A.P, 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan APBD di Kabupaten Maluku Tengah*. Journal *Economia* Vol.09-No.38-55, Politeknik Negeri Ambon.
- Soediyono. 1992. *Ekonomi Makro; Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran. Agregatif*. Yogyakarta : LIBERTY.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei I*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widarjono, Agus, 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Internet :

<http://Jatim.bps.go.id>
<http://Jemberkab.bps.go.id>
<http://bodowoso.bps.go.id>
<http://banyuwangikab.bps.go.id>
<http://situbondokab.bps.go.id>
www.Jemberkab.go.id
www.Banyuwangikab.go.id
www.Bondowosokab.go.id
www.Situbondokab.go.id

LAMPIRAN A

**Data Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2005-2014**

KAB/Tahun	Pengeluaran Pemerintah	PDRB Sektor Pertanian (juta rp)	Tenaga Kerja
Kabupaten Jember			
2005	15.405.000.000	3.642.812	524.263
2006	27.651.000.000	3.839.516	525.263
2007	33.365.000.000	4.066.679	526.264
2008	31.417.000.000	4.298.765	527.265
2009	30.147.000.000	4.523.817	528.266
2010	28.873.000.000	10.634.000	530.267
2011	36.663.000.000	11.149.000	585.501
2012	40.922.000.000	11.438.000	587.546
2013	49.937.000.000	11.912.000	511.796
2014	45.328.000.000	12.334.000	427.357
Kabupaten Bondowoso			
2005	5.201.201.683	868.975,39	178.437
2006	9.446.083.905	908.338,35	209.099
2007	13.923.586.623	956.378,51	209.068
2008	12.849.061.461	1.005.619,67	218.436
2009	18.346.408.893	1.386.352,00	219.399
2010	14.780.939.220	2.928.232,42	220.481
2011	17.500.983.765	3.044.330,26	222.272
2012	30.238.130.537	3.167.055,89	226.553
2013	15.203.495.291	3.261.300,26	229.171
2014	22.584.785.418	3.347.360,50	229.760
Kabupaten Situbondo			
2005	10.513.045.645	867.150,08	183.090
2006	17.770.951.861	924.088,19	182.060
2007	12.430.451.940	988.891,29	317.228
2008	19.483.479.138	1.037.973,36	180.798
2009	20.151.944.043	1.097.536,11	190.789
2010	13.892.890.172	3.034.249,10	210.679
2011	17.284.987.988	3.128.296,30	252.896
2012	14.308.603.380	3.245.112,70	255.752
2013	30.210.978.508	3.393.393,40	259.789
2014	40.529.160.499	3.500.724,20	259.090
Kabupaten Banyuwangi			
2005	2.591.527.800	4.178.474,97	199.780
2006	9.073.821.620	4.371.508,37	188.040
2007	25.836.236.614	4.610.837,91	224.756
2008	17.765.068.600	4.649.526,41	234.670

Lanjutan

KAB/Tahun	Pengeluaran Pemerintah	PDRB Sektor Pertanian (juta rp)	Tenaga Kerja
2010	10.066.379.045	11.536.346,09	333.707
2011	20.181.751.909	12.056.043,03	297.660
2012	17.325.599.465	12.927.750,69	287.474
2013	24.853.396.512	13.593.619,88	311.862
2014	31.123.873.497	14.253.022,00	313.989

LAMPIRAN B

B.1 *Fixed effect Model*

Dependent Variable: PDRB
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 04/29/16 Time: 01:06
 Sample: 2005 2014
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.706275	2.834231	0.249195	0.8047
GOV?	0.438893	0.169492	2.589455	0.0140
TK?	1.344591	0.559409	2.403592	0.0218
Fixed Effects (Cross)				
_JEMBER--C	-0.175976			
_BONDOWOSO--C	-0.088790			
_SITUBONDO--C	-0.150343			
_BANYUWANGI--C	0.415108			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.759496	Mean dependent var	12.55475
Adjusted R-squared	0.724128	S.D. dependent var	0.393498
S.E. of regression	0.206679	Akaike info criterion	-0.177816
Sum squared resid	1.452355	Schwarz criterion	0.075516
Log likelihood	9.556325	Hannan-Quinn criter.	-0.086219
F-statistic	21.47396	Durbin-Watson stat	0.874840
Prob(F-statistic)	0.000000		

B.2 *Random Effects Model*

Dependent Variable: PDRB
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/29/16 Time: 01:07
 Sample: 2005 2014
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.320675	2.428342	0.543858	0.5898
GOV?	0.426204	0.168427	2.530491	0.0158
TK?	1.255899	0.473606	2.651781	0.0117
Random Effects (Cross)				
_JEMBER--C	-0.139045			
_BONDOWOSO--C	-0.093967			
_SITUBONDO--C	-0.148629			
_BANYUWANGI--C	0.381641			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.236419	0.5668
Idiosyncratic random			0.206679	0.4332
Weighted Statistics				
R-squared	0.381398	Mean dependent var		3.345273
Adjusted R-squared	0.347960	S.D. dependent var		0.258777
S.E. of regression	0.208960	Sum squared resid		1.615581
F-statistic	11.40615	Durbin-Watson stat		0.755087
Prob(F-statistic)	0.000138			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.383265	Mean dependent var		12.55475
Sum squared resid	3.724341	Durbin-Watson stat		0.327549

LAMPIRAN C

C.1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOLED1

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.804710	(3,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	36.374971	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/16 Time: 01:08

Sample: 2005 2014

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.541707	2.065579	1.714631	0.0948
GOV?	0.213269	0.245577	0.868441	0.3908
TK?	1.249984	0.369091	3.386657	0.0017
R-squared	0.402884	Mean dependent var		12.55475
Adjusted R-squared	0.370608	S.D. dependent var		0.393498
S.E. of regression	0.312179	Akaike info criterion		0.581558
Sum squared resid	3.605860	Schwarz criterion		0.708224
Log likelihood	-8.631160	Hannan-Quinn criter.		0.627356
F-statistic	12.48227	Durbin-Watson stat		0.265282
Prob(F-statistic)	0.000072			

C.2 Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOLED1

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.821173	2	0.0440

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GOV?	0.438893	0.426204	0.000360	0.5036
TK?	1.344591	1.255899	0.088636	0.7658

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/16 Time: 01:07

Sample: 2005 2014

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.706275	2.834231	0.249195	0.8047
GOV?	0.438893	0.169492	2.589455	0.0140
TK?	1.344591	0.559409	2.403592	0.0218

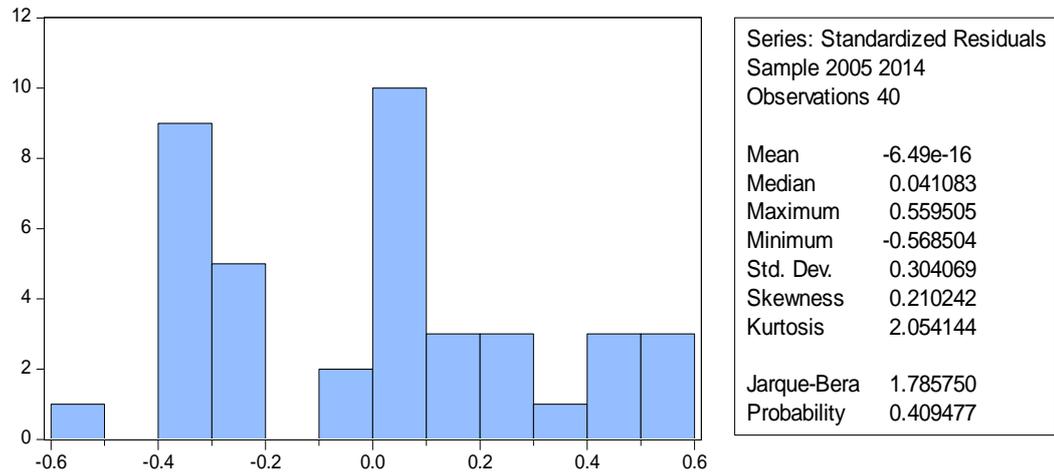
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.759496	Mean dependent var	12.55475
Adjusted R-squared	0.724128	S.D. dependent var	0.393498
S.E. of regression	0.206679	Akaike info criterion	-0.177816
Sum squared resid	1.452355	Schwarz criterion	0.075516
Log likelihood	9.556325	Hannan-Quinn criter.	-0.086219
F-statistic	21.47396	Durbin-Watson stat	0.874840
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN D

D.1 Uji Normallity Test



D.2 Uji Multikollinearitas

Matrik Correlation	PDRB	GOV	TK
PDRB	1.000000	1.000000	0.625070
GOV	0.466677	1.000000	0.606233
TK	0.625070	0.606233	1.000000

D.3 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/13/16 Time: 02:33
 Sample: 2005 2014
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.207725	1.207838	-0.171980	0.8645
GOV	-0.082464	0.072231	-1.141669	0.2616
TK	0.224732	0.238398	0.942674	0.3525

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.069994	Mean dependent var	0.170934
Adjusted R-squared	-0.066771	S.D. dependent var	0.085278
S.E. of regression	0.088079	Akaike info criterion	-1.883693
Sum squared resid	0.263767	Schwarz criterion	-1.630361
Log likelihood	43.67385	Hannan-Quinn criter.	-1.792096
F-statistic	0.511785	Durbin-Watson stat	1.737699
Prob(F-statistic)	0.765372		

Uji Durbin Watson (Autokol)

R-squared	0.759496	Mean dependent var	12.55475
Adjusted R-squared	0.724128	S.D. dependent var	0.393498
S.E. of regression	0.206679	Akaike info criterion	-0.177816
Sum squared resid	1.452355	Schwarz criterion	0.075516
Log likelihood	9.556325	Hannan-Quinn criter.	-0.086219
F-statistic	21.47396	Durbin-Watson stat	0.874840
Prob(F-statistic)	0.000000		